

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- A'an Efendi dan Freddy Poernomo. 2017. *Hukum Administrasi*. Sinar Grafika. Jakarta Timur.
- Alex S. 2015. *Sukses Mengolah Sampah Organik menjadi Pupuk Organik*. Pustaka Baru Press. Yogyakarta.
- Aminuddin Ilmar. 2013. *Hukum Tata Pemerintahan*. Identitas Universitas Hasanuddin. Makassar.
- Amran Suadi. 2014. *Sistem Pengawasan Badan Peradilan di Indonesia*. PT. Rajagrafindo Persada. Depok.
- Angger Sigit Pramukti dan Meylani Chahyaningsih. 2018. *Pengawasan Hukum terhadap Aparatur Negara*. Media Pressindo. Yogyakarta.
- Arief Muljadi. 2005. *Landasan dan Prinsip Hukum Otonomi dalam Negara Kesatuan RI*. Prestasi Pustaka. Jakarta.
- Celina Tri Siswi Kristiyanti. 2008. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Irwansyah. 2020. *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. Mirra Buana Media. Yogyakarta.
- Lexy J. Moleong. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Nandang Alamsyah. 2014. *Teori dan Praktik Kewenangan Pemerintah*. Unpad Press. Bandung.
- Nurmayani. 2000. *Hukum Administrasi Negara*. Universitas Lampung. Bandar Lampung.
- \_\_\_\_\_. 2009. *Hukum Administrasi Daerah*. Universitas Lampung. Bandar Lampung.
- Peter Mahmud Marzuki. 2011. *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
- Philipus M. Hadjon. 2005. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Gajah Mada University Press. Yogyakarta.

- Ridwan HR. 2006. *Hukum Administrasi Negara*. PT. RajaGrafindo. Jakarta.
- S. Prajudi Atmosudirjo. 2002. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta. Ghalia Indonesia.
- Sadjijono. 2006. *Bab-Bab Pokok Hukum Administrasi*. LaskBang Pressindo. Yogyakarta.
- Sahya Anggara. 2018. *Hukum Administrasi Negara*. Pustaka Setia. Bandung.
- Saiful Anwar. 2004. *Sendi-sendi Hukum Administrasi Negara*. Gelora Madani Press. Medan.
- Sarundajang. 2002. *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta.
- Setya Retnami, 2001. *Makalah Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Kantor Menteri Negara Otonomi Daerah Republik Indonesia. Jakarta.
- Sondang P. Siagian. 2000. *Administrasi Pembangunan*. Gunung Agung. Jakarta.

**Peraturan Perundang-Undangan:**

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Peraturan Walikota Makassar Nomor 21 Tahun 2023 tentang Pelarangan Penggunaan Kantong Plastik
- Peraturan Walikota Makassar Nomor 70 Tahun 2019 tentang Pengendalian Penggunaan Kantong Plastik

## **Jurnal:**

- Abdul Haris, Heri Kusmanto, dan Siti Mardiana. "Fungsi pengawasan inspektorat kabupaten serdang bedagai". *Jurnal Administrasi Publik: Public Administration Journal*. Vol. 6 No .1. 2016.
- Abdul Ropik Fauzi dan Wahyu Nugroho. "Penegakan Hukum Administrasi Lingkungan Hidup terhadap Pencemaran Pembuangan Limbah Kulit ". *Journal IURIS SCIENTA*. Vol. 1 No. 2. 2023.
- Aditia Syaprillah. "Penegakan Hukum Administrasi Lingkungan melalui Instrumen Pengawasan". *Jurnal Bina Hukum Lingkungan*. Vol. 1 No. 1. 2016.
- Andi Bau Inggit. "Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah". *Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin*. Vol. 3, Nomor 1. 2018.
- Andri Gunawan Wibisana. "Tentang Ekor yang Tak Lagi Beracun: Kritik Konseptual Atas Sanksi Administratif dalam Hukum Lingkungan di Indonesia". *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*. Vol. 6 No.1. 2019.
- Dewi, Yusma, and Trisno Raharjo. "Aspek Hukum Bahaya Plastik terhadap Kesehatan dan Lingkungan serta Solusinya". *Kosmik Hukum*. Vol. 19 No. 1. 2019.
- Diana E. Rondonuwu. "Tinjauan Yuridis Terhadap Penegakan Hukum Lingkungan Administratif menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009". *Lex Privatum*. Vol. 6 No.9. 2019.
- Gamal Muhammad Rizki, Afif Bintoro, dan Rudi Hilmanto. "Perbandingan Emisi Karbon dengan Karbon Tersimpan di Hutan Rakyat Desa Buana Sakti Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur". *Jurnal Sylva Lestari*. Vol. 4, No. 1. 2016.
- Harsanto Nursadi. "Tindakan Hukum Administrasi (Negara) Perpajakan Yang Dapat Berakibat Pada Tindakan Pidana". *Jurnal Hukum & Pembangunan*. Vol. 48 No. 1. 2018.
- M. Agus Santoso. "Peran dewan perwakilan rakyat daerah dalam menjalankan fungsi pengawasan". *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*. Vol.18, Nomor 4. 2011.
- N. Jayanti. "Mekanisme Pengawasan Terhadap Produk Hukum Dalam Konstruksi Politik Hukum". *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai*. Vol. 4 No. 2. 2019.

- Ni Putu Pranasari Tanjung dan Muhammad Wiman Wibisana. "Politik Hukum Penanganan Sampah Plastik Sekali Pakai". *Jurnal Magister Hukum Udayana*. Vol. 9 No.1. 2020.
- Nur Hari Susanto. "Karakter Yuridis Sanksi Hukum Administrasi: Suatu Pendekatan Komparasi". *Administrative Law & Governance Journal*. Volume 2 Nomor 1. 2019.
- Nurhenu Karuniastuti. "Bahaya Plastik terhadap Kesehatan dan Lingkungan". *Swara Patra: Majalah Ilmiah PPSDM Migas*. Vol. 3, Nomor 1. 2013.
- Riana Kesuma Ayu. "Prinsip Ihya Al Mawat dalam Penegakan Hukum Sumber Daya Alam". *Wasaka Hukum*. Vol. 10 No. 2. 2022.
- Sapto Hermawan dan Gatot Isnawanjati Budi Abiyudo. "Potensi Penggunaan Platform Sosial Media Guna Mengurangi Sampah Plastik di Lautan Indonesia." *Kosmik Hukum*. Vol. 22 No.2. 2022.
- Siti Ruhama Mardhatillah. "Urgensi dan Efektifitas Sanksi Administrasi dalam Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun". *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*. Vol. 23 No. 3. 2016.
- Wendry Beny Notanubun. "Analisis Hukum Penindakan bagi Pelanggaran dan Penyalahgunaan Lingkungan Hidup ditinjau dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup". *Lex Administratum*. Vol. 9 No. 4. 2021.
- Wicipto Setiadi. "Sanksi Administratif sebagai Salah Satu Instrumen Penegakan Hukum dalam Peraturan Perundang-undangan". *Jurnal Legislasi Indonesia*. Vol. 6 No.4. 2018.
- Yamin Yamin. "Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencemaran Baku Mutu Udara Dan Baku Mutu Air Laut Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup". *National Journal of Law*. Vol. 4 No.1. 2021.
- Yanti, Aviany, and Winda Fitri. "Sanksi Pencemaran Lingkungan Hidup dalam Undang-Undang Cipta Kerja: Studi Komparatif Negara Jepang". *Mulawarman Law Review*. 2022.
- Zulkifli Aspan dan Ahsan Yunus. "The right to a good and healthy environment: Revitalizing green constitution". *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*. Vol. 343, No. 1. 2019.

**Sumber Berita:**

Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3, Kementerian Lingkungan Hidup, RI.

<https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/public/data/timbulan> diakses 16 April 2022.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar.

<http://dlh.makassar.go.id/berita/sosialisasi-perwali-kota-makassar-no-70-tahun-2019-tentangpengendalian-penggunaan-kantong-plastik> diakses 11 Maret 2022.